

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

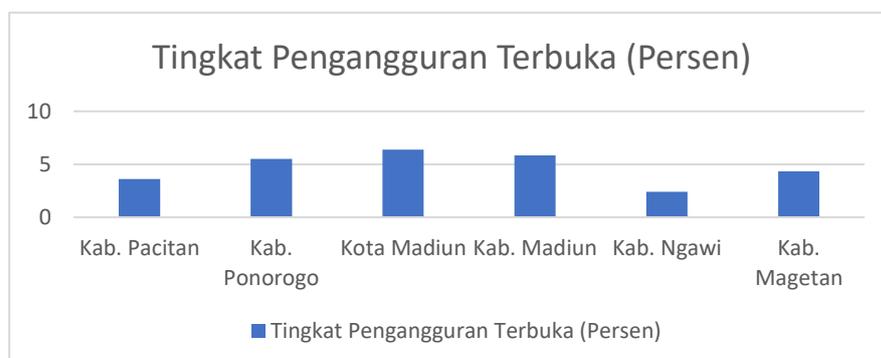
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang di dalamnya terdapat berbagai masalah seperti permasalahan sosial ataupun ekonomi. Permasalahan di Indonesia yang krusial meliputi beberapa hal salah satunya seperti pengangguran. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan pengangguran, akan tetapi dari tahun ke tahun permasalahan tersebut masih belum juga terselesaikan. Masalah pengangguran ini harus segera diatasi karena pengangguran merupakan isu penting yang dapat menyebabkan berbagai permasalahan sosial.

Negara Indonesia hingga saat ini masih berupaya untuk menciptakan tujuan nasional yaitu mensejahterakan dan memakmurkan seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu indikator kesejahteraan adalah kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah harus menyediakan lapangan kerja yang memadai agar angkatan kerja yang ada dapat terserap dengan baik sehingga mereka memiliki penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Populasi penduduk yang tinggi di Indonesia mengakibatkan terjadinya peningkatan pengangguran karena lapangan kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Serta dengan adanya laju pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan peningkatan pengangguran di setiap tahunnya (Khatijah Ishak, 2018).



Grafik 1 15 Besar Peringkat Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur
Sumber : Badan Pusat Statistik

Apabila dilakukan perbandingan dengan pengangguran terbuka pada wilayah lain di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun menduduki peringkat ke-14 dari 38 Kabupaten dan Kota pada tahun 2022. Kedudukan ini mencerminkan bahwa tingkat penganggurannya masih tergolong tinggi. Sedangkan jika dilihat pada lingkup satu karesidenan Madiun maka Kabupaten Madiun menempati posisi kedua dari enam wilayah Kabupaten/Kota. Perbandingan tingkat pengangguran terbuka wilayah Karesidenan Madiun dapat dilihat melalui grafik berikut.



Grafik 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Karesidenan Madiun
Sumber : Badan Pusat Statistik

Kabupaten Madiun selain menduduki peringkat kedua dalam lingkup satu karesidenan karena penambahan tingkat pengangguran terbuka pada wilayah tersebut cukup signifikan. Tingginya presentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Madiun cukup tinggi dibanding dengan wilayah lainnya tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yakni akibat adanya kebijakan saat terjadinya wabah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak karyawan yang diberhentikan dari pekerjaannya (Franita & Fuady, 2019). Selain itu menurut Badan Pusat Statistik, di Kabupaten Madiun terjadi peningkatan sejumlah kelompok yang masuk sebagai tenaga kerja seperti pada tahun 2022 mengalami penambahan berkisar 24.301 tenaga.

Tingkat pengangguran yang tinggi harus segera diatasi agar tidak menimbulkan terjadinya berbagai masalah sosial. Pemerintah harus berupaya menambah lapangan kerja yang ada dan memberikan pelatihan – pelatihan kewirausahaan agar jumlah pengangguran yang ada dapat ditekan. Sebab jika terus dibiarkan maka pengangguran akan berpotensi menyebabkan kemiskinan. Kondisi pengangguran terbuka di Pulau Jawa masih fluktuatif, tidak ada penurunan yang signifikan dimana dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Pemerintah harus berupaya dan bekerja keras dalam menyelesaikan masalah pengangguran yang terjadi dimana setiap tahunnya selalu mengalami lonjakan. Pemerintah harus membuat program kerja baru seperti penyediaan lapangan kerja yang lebih luas, mengadakan program – program pelatihan kerja sehingga angkatan kerja baru mampu membuka usaha sendiri serta penambahan – penambahan modal bagi UMKM

maka seluruhnya bisa mempertahankan untuk bersaing guna mendapatkan tenaga kerja yang baru. Akhirnya mampu mengurangi pengangguran dan mengoptimalkan sumber daya manusia hingga dapat bersifat produktif.

Negara Indonesia ini bentuknya kepulauan yang penduduknya terbanyak ada di Pulau Jawa. Terdapat 160 juta orang yang tenaga kerjanya tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang telah tercipta. Penduduk yang terdapat di Kabupaten Madiun terus bertambah terutama tahun 2019 menuju 2020. Penambahan jumlah jiwa ini yang terjadi sebesar 20.000 jiwa dalam kurun waktu satu tahun. Berarti kondisi tersebut merrepresentasikan jumlah jiwa yang semakin bertambah tentu permintaan yang seharusnya dipenuhi juga semakin besar

Tingginya tingkat pengangguran terbuka berdampak pada kehidupan masyarakat yaitu pendistribusian pendapatan yang belum merata antara wilayah pedesaan dengan perkotaan. Kenaikan persentase tingkat pengangguran terbuka jika tidak diatasi dapat menimbulkan berbagai macam persoalan baik persoalan ekonomi maupun persoalan sosial. Untuk itu pemerintah harus berupaya agar tenaga kerja yang ada dapat terserap agar tidak terjadi peningkatan jumlah pengangguran di setiap tahunnya.

Selain jumlah penduduk, tingkat pendidikan masyarakat juga berkaitan dengan adanya pengangguran terbuka karena tingkat pendidikan dari tenaga kerja yang menentukan kualitas dari tenaga kerja tersebut. Pendidikan merupakan hal yang penting karena setiap lapangan kerja yang tersedia memiliki pengaruh pada tingkat kualitas tenaga kerja, dengan keadaan tingkat

pendidikan yang lebih baik akan menunjukkan kualitas sumber daya yang dimiliki manusia tersebut (Prakoso, 2020). Tingkatan pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas sumber daya manusia. Ketika kondisi pendidikan seseorang tinggi, maka semakin tinggi workability atau produktivitasnya. Dengan upaya meningkatkan kualitas SDM lewat meninggikan pendidikan harapannya tentu untuk mengurangi angka pengangguran. Tingkatan pendidikan dapat dinilai berdasar capaian lama sekolah secara rinci rata-rata lamanya menempuh sekolah di Kabupaten Madiun dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Madiun
Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan grafik yang telah disajikan diketahui terjadi kenaikan pada setiap tahunnya. Meskipun demikian masyarakat di Kabupaten Madiun rata-rata capaian pendidikannya masih relatif rendah yaitu sebesar 6,6 tahun saja.

Upah adalah imbalan yang diterima oleh pekerja. Upah penting bagi perusahaan dan pekerja. Untuk pekerja, upah artinya sumber pendapatan untuk diri sendiri dan anggota keluarga dan secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, upah adalah biaya produksi dan harus

disederhanakan untuk perusahaan. Ketika mengalami upah yang naik dan meninggi, pelaku usaha mestinya akan melakukan pengurangan pekerja sampai batas tertentu. Hal ini tentu akan berdampak pada pengangguran.

Upah minimum pada Kabupaten Madiun terdapat fase peningkatan di setiap tahun hingga per 2022 mencapai Rp1.958.410,-. Disebut dengan upah minimum kabupaten dikarenakan setiap kabupaten/kota memiliki standar hidup layak yang berbeda-beda. Kebijakan kenaikan upah merupakan wewenang pemerintah untuk melindungi para pekerja. Besaran upah sangat berpengaruh terhadap kehidupan para pekerja. Upah yang rendah mengakibatkan angkatan kerja tidak tertarik untuk melamar pekerjaan, hal tersebut dapat mendorong terjadinya penambahan angka pengangguran yang ada. Sehingga besarnya upah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.

Upah adalah gaji yang diterima oleh pekerja karena mereka telah melaksanakan pekerjaannya dan menerima timbal balik berupa sejumlah uang. Menurut pelaku usaha upah artinya biaya yang berupa uang dan hukumnya wajib digunakan pada saat melakukan produksi dengan demikian jika menginginkan nilai untung yang optimal, upah harus dibuat seminim mungkin. Besarnya nilai gaji akan memiliki pengaruh pada kehidupan tenaga yang dipekerjakan, karena kebutuhannya akan dapat dipenuhi dengan gaji.

Jumlah upah yang ditetapkan pemerintah dapat memberikan memberikan efek pada bertambah atau turunnya tingkat pengangguran. Saat pemerintah menetapkan nilai upah yang tinggi maka perusahaan akan mengurangi jumlah

tenaga kerja yang ada sehingga mengakibatkan kenaikan angka pengangguran. Kenaikan upah menambah pembengkakan biaya operasional perusahaan dan mengharuskan perusahaan untuk melakukan penghematan dengan mengurangi tenaga kerja yang ada. Pemerintah menetapkan upah minimum untuk melindungi hak pekerja sehingga terjadi keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan pekerja. Besar kecilnya kenaikan upah minimum diatur dalam sebuah undang-undang sehingga menjadi peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan karena memiliki kekuatan hukum.

Selanjutnya terdapat faktor lain yang terkait dengan pengangguran terbuka yakni PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Dalam menilai tingkat proses membangun ekonomi disuatu wilayah dapat dilakukan dengan melihat PDRB yang termasuk dalam indikator makro ekonomi. PDRB artinya nilai bersih barang serta jasa pada tahap akhir yang diperoleh dari seluruh kegiatan ekonomi pada satu wilayah pada suatu periode yang ditentukan. PDRB dapat diartikan sebagai total dari nilai output bersih perekonomian yang diciptakan oleh semua kegiatan ekonomi pada satu wilayah (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu (satu tahun kalender). Kegiatan yang dimaksud tentunya meliputi seperti kegiatan kelompok pertanian, kelompok pertambangan, kelompok industri pengolahan, hingga produk jasa.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, nilai PDRB selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi meskipun tidak cukup besar yakni pada tahun 2019 ke tahun 2020. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui keadaan perekonomian suatu daerah pada suatu

periode tertentu. Kenaikan PDRB Kabupaten Madiun tidak lepas dari peran pemerintah setempat yang melakukan efisiensi dan efektifitas kebijakan dalam pengurangan pengangguran yaitu dengan mempercepat pembangunan ekonomi dengan melakukan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi untuk berkembang.

Dari penjelasan yang telah diuraikan, penulis akan melakukan penelitian terkait tentang tingkat poengguran terbuka menggunakan variabel bebas jumlah penduduk, tingkat pendidikan, upah minimum, dan PDRB Kabupaten dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Kabupaten Madiun”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Madiun?
- 2 Apakah rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Madiun?
- 3 Apakah upah minimum kabupaten berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Madiun?
- 4 Apakah PDRB kabupaten berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Madiun?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan urian latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perlu diketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Madiun.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Madiun.
- 3 Untuk mengetahui pengaruh upah minimum kabupaten terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Madiun.
- 4 Untuk mengetahui pengaruh PDRB kabupaten terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Madiun.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi, masukan ataupun sebagai pandangan untuk kedepannya dalam menentukan suatu kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan tentang pengangguran terbuka di Indonesia.
- 2 Bagi peneliti yang lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama yakni berkaitan dengan permasalahan tentang pengangguran terbuka di Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Madiun.